

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (P)**



**ANALISIS PERKEMBANGAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
UPAYA MENEMUKAN DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
BERKEADILAN (STUDI DI KABUPATEN BOJONEGORO)**

Tahun ke satu dari rencana dua tahun

Ketua: Herlin Wijayati, SH, MH (0020106010)

Anggota:

Tunggul Anshari SN, SH, M.Hum (0024055906)

Reka Dewantara, SH, MH (0002058303)

Dibiayai oleh:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 407/SK/2013 tanggal 2 September 2013

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DESEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah dalam Upaya Menemukan Desain Pemerintahan Daerah yang Berkeadilan (Studi Di Kabupaten Bojonegoro)

Nama Lengkap Peneliti : Herlin Wijayati, SH, MH
NIDN : 0020106010
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Nomor HP : 08123309188
Alamat surel (E-mail) : wijayati.herlin@ub.ac.id

Nama Lengkap Anggota 1 : Tunggul Anshari, SH, M.Hum
NIDN : 0024055906

Nama Lengkap Anggota 2 : Reka Dewantara, SH, MH
NIDN : 0002058303

Penanggung Jawab : Herlin Wijayati, SH, MH
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke satu dari rencana dua tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 50.000.000,-
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 105.000.000,-

Malang, 22 Desember 2013

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UB



(Dr. Sitabudin, SH, MH)
NIP. 19591216 198503 1 001

Ketua,

(Herlin Wijayati, SH, MH)
NIP. 19601020 198601 2 001

Menyetujui,
Pjs. Ketua LPPM UB



(Prof. Dr. Ar. Siti Chuzaemi, MS)
NIP. 19430514 198002 2 001

ABSTRAK

Sektor migas sebagai salah satu dari sumber daya alam (*non-renewable*) strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan di sektor industri ekstraktif migas sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional, termasuk bagi daerah. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah: 1). Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan minyak bumi. 2). Bagaimanakah pengelolaan minyak bumi di Kabupaten Bojonegoro kaitannya dengan potensi lokal yang dimiliki. 3). Bagaimanakah rancangan peraturan daerah pengelolaan minyak bumi yang berkeadilan di Kabupaten Bojonegoro. sifat penelitian yang dilakukan adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 3 (tiga) hal yaitu : 1). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan minyak bumi. 2). adanya inisiatif transparansi untuk industri migas (*extractive industry transparency initiative*). 3). Rancangan peraturan daerah pengelolaan minyak bumi yang berkeadilan di Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci : Desain, Pemerintahan Daerah, Berkeadilan.

ABSTRACT

Oil and gas sector is one of the *non-renewable* energy strategic with domination state for gave the people a more prosperous life, and has an important purpose in national economic development. Oil and gas must gave a maximum prosperius life. The legal issues are : 1). How the district government managed oil and gas. 2). How Bojonegoro as a district government managed their potential oil and gas. 3).How the legislative drafting district government act about oil and gas with the principles of equity. The caracter of the research were preskriptif and applied research. Statuta approuch was being the research programme. There were three result : 1). The district government right in oil and gas management. 2). Ekstractive industry transparency initiative. 3). the legislative drafting district government act about oil and gas with the principles of equity at Bojonegoro.

Keywords : Desaign, District Government, The Principles of Equity.

RINGKASAN

Diperlukan analisis mendalam terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan minyak bumi untuk menemukan rancangan peraturan daerah pengelolaan minyak bumi yang berkeadilan terutama bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hal tersebut dengan menggunakan metode penelitian empiris serta sifat penelitian yang preskriptif dan terapan. Studi dilakukan di Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi minyak terbesar di Indonesia.

Prinsip keadilan diimplementasikan dalam rancangan peraturan daerah tentang transparansi tata kelola pendapatan dalam kegiatan industri migas di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SUMMARY

Needs indepth analysis about how the district government managed their non renewable energy (oil and gas). To find the desaign district government act about the principles of equity in oil and gas industry specially for the district government who has natural resources.

The purpose of this research to find the desaign the principles of equity in oil and gas industry in district government act at Bojonegoro, one of the biggest district who has natural resources (oil).

The principles of equity in oil and gas management applied in design district government act hase on 33 section of UUD 1945. The constitution gives limit the domination state for resources for gave the people a more prosperous life.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1991, Kebijakan Pembangunan Orde Baru, Prisma, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution dkk, *Federalisme untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000.
- Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Al Araf dan Awan Puryadi, 2002, Perebutan Kuasa Tanah,, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Alpert R, 1979, The Uniform Class Action Act; Some Promise and Some Problems, Han.J.Leg.
- Amien Rais, 1996, Politik Minyak, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aminuddin Kirom dkk, 2005, Tambang dan Kemiskinan (Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Jakarta
- Anthony Giddens, 1997, Kapitalisme dan Teori-teori Sosial Modern, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arimbi Heroepoetri, 2001, Tak Ada Tempat Bagi Rakyat (Wewenang Pengelola Sumber Daya Alam Dalam Undang-undang Otonomi Daerah), YLBHI, E-Law Indonesia, RACA Institute, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA, Jakarta, 1993.
- dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Bambang. Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1994, Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan PT. Aditya Bakti, Bandung.

- George Soros, 2002, *The Crisis of Global Capitalism; Open Society Endangered*, (ter) Didin Solihudin dalam; *Krisis Kapitalisme Global; Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya*, Qalam, Yogyakarta.
- Gita W.Laksmi Soerjoatmodjo, 2005, *Menyelesaikan Perkara Tanpa Prahara, Penggunaan UU Pers No. 40/1999 dalam Sengketa Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Media Development Loan Fund, Indonesia*.
- Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni*, Rindi Pers, Jakarta.
- HCB, Dharmawan dan Al Soni (Editor), 2005, *BBM Antara Lahan Hidup dan Lahan Korupsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Eagan: West Publishing Co., 1978).
- Howard R. Williams dan Charles J. Meyers, 1994, *Manual of Oil and Gas Terms*, New York, 9th edition, Matthew Bender & Co.Inc.
- Hugh Collins, *Regulating Contracts*, Oxford University Press, Oxford, 2002.
- I. Nyoman Nurajaya, 1993, *Politik Hukum Penguasaan Hutan di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta.
- Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi, editor, *Kontroversi Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*, Mizan, 2002.
- Juis A Hartono, 1990, *Di bawah Bayang-bayang Sukarno-Suharto*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- James Petras dan Henry Veltmeyer, 2002, *Imperialisme Abad 21*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Joseph Stiglitz, 2002, *Globalization and Its Discontents*, Allen Lane, Penguin Books, London
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Jeanne S Mintz, Muhammad Marx Marhaen, 2002, *Akar Sosialisme Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2008.
- Kirsten Bindeman, 1999, *Production-Sharing Agreements: An Economics Analysis*, Oxford Institute for Energy Studies.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lukman Sutrisno, et.al, 1997, *Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Industri Pertambangan dengan Masyarakat Sekitar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Louis Kaplow dan Steven Shavell, 1999, *Economic Analysis of Law*, National Bureau of Economic Research, Cambridge
- M.A. Sudjan, *Law Relating to Government Contracts*, Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd, Delhi, 2003.
- Maria Farida Indrati Soeprpto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mansor Fakhri, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta
- M.E. and D. Mermelastein, 1967, *The Great Society Reader, The Failure of American Liberalism*, Vintage Book, New York.
- Muhammad Taber Azhari, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung.
- , *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1983
- M. Kusnardi, dan Harmaily. Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- M. Yamin, Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta, 1995.

- Mexsasai Indra; *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Mumu muhajir, 2006, Quo Vadis; Kemandirian Bangsa dalam Bidang Energi, Institut Sumber Daya Alam, Jakarta
- Moh. Mahfud.MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Mahfud. MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 1977, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Notonagoro, 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, Bina Aksara, Jakarta
- Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung.
- Patrick Parkinson (ed), *The Principles of Equity*, Lawbook co, Sydney, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Cet. VIII, Yogyakarta, 2002.
- Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, 1979, Perundang-undangan dan yurisprudensi, Alumni, Bandung.
- Purnomo Yusgiantoro, 2000, Ekonomi Energi Teori dan Praktek, Jakarta, LP3ES.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian, Hukum ,Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan: Dinamika Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Roscoe Pound, *an Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Heaven, Connecticut, 1954. Terjemahan M. Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1972
- R. Soepomo, Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta, 1995.
- Rudi M. Simamora, 2000, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta.

- Robert A. Dahl, 1992, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- R. Wiratno, dkk, 1958, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Syamsuddin Haris (editor), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Svetlana Tsalik dan Anna Schiffrin (editor), 2007, *Covering Oil Mengenyahkan Kutukan Sumber Daya Alam, Panduan Wartawan Meliput Energi dan Pembangunan*, Pantau, Jakarta.
- Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, Putra A. Bardin, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Timur Mahardika, *Tarik Ular Relasi Pusat Daerah (Perkembangan Pengaturan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kritis)*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Tim Walhi, 2008, *Lapindo Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi*, Wahana Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Tim Lemhannas, 1997, *Pembangunan Nasional*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.
- Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Sanusi Bachrawi, 1985, *Minyak Bumi Mengubah Ekonomi Dunia*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (editor), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Soetandyo Wignjosebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940)*, Bayumedia Publishing, edisi kedua cetakan kedua, Malang, 2008.

Textbook on International Law Third Edition Martin Dixon MA, 1996, Blackstone Press Limited.

Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal (Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I), Terjemahan Moh. Arifin, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Steven and Sons, London, 1971.

W. Noel Keyes, *Government Contract in A Nutshell*, West Publishing Co., St. Paul, Minn. 1990.

Disertasi

A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV)*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2011.

Fadel Muhammad, *Signifikansi Peran Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Provinsi Gorontalo*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2007.

Muhammad Fauzan, *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Padjajaran, 2006.

Muchammad Zaidun, 2005, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Ronald Z. Titahelu, *Penetapan Azas-azas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.

Sidharta, 2007, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Desertasi, Universitas Parahiyangan Bandung.

Sodjuangon Sitimurang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Tengku Nathan Machmud, 2000, *The Indonesian Production Sharing Contract An Investor's Perspective*, Desertation, Universiteit Leiden, The Netherlands.

Wahyudi Kumorotomo, *The Politics of Fiscal Decentralisation: A Study on Policy Development in Indonesia 1974-2004*, University Sains Malaysia Tahun 2007.

Majalah, Jurnal, Pidato Pengukuhan, Makalah Seminar, Laporan Penelitian, Artikel Koran, Web-Site Internet.

Adi Suryadi Culla, *Otonomi Daerah dalam Tinjauan Politik*, Jurnal Usahawan No. 4 XXIX April 2000.

A. Mukthie Fadjar, 2005, Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan Undang-undang Sumber Daya Alam, dalam Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 2 bulan September tahun 2005.

Agus Broto Susilo, 1999, Analisis Ekonomi Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Majalah Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional) No. 2 Tahun 1999.

Ari Winarso, 2007, Konsep Kosmologi Menurut Pemikiran Murtadha Muthahhari, etd.library.ums.ac.id, diakses pada tanggal 21 Mei 2008.

Bagir Manan, 1999, Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.

Cong Kee Choi dan Saut Hutagalung, 1998, "Future Chalenge Fishiries Forum III : Country Report", Makalah dalam Seminar The Rule Of Fisheries in the Second Long-term Development Plan di Sukabumi Indonesia, Tahun 1998.

Cut Asmaul Husna TR, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PSC*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Desember 2012.

Dahnil Azhar Simanjuntak, 2008, Meneropong Politik Hukum Ekonomi Indonesia, dalam www.one.indoskripsi.com diakses pada tanggal 27 Februari 2008.

- Dato' Hamzah Bin Bakar, 2002, Roundtable Discussion on Downstream Oil and Gas Restructuring in Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta, 15-16 Oktober 2002.
- Eman, *Hukum Agraria dan Reforma Pertanahan di Indonesia*, Yuridika, Volume 18, Juli 2003.
- Econit., RUU Minyak dan Gas Bumi 1999 Agenda Tersembunyi dan Konflik Kepentingan, Econit Advisory Group, Paper No. 34 tanggal 31 Maret 1999, www.detik.com, diakses pada tanggal 10 Maret 2007.
- Dwi Astuti, Globalisasi dan Akibatnya terhadap Kemiskinan di Indonesia, Makalah Seminar Tentang Globalisasi dan Kemiskinan Sosial, www.google.com
- Didi Irawadi Syamsuddin, 2001, Globalisasi Hukum, Jurnal Keadilan Volume 1 No. 4 Oktober 2001.
- dbase Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga diolah dari berbagai sumber, tertuang dalam Greenomics, 2004, Divestasi Modal Ekologi dalam praktek Tambang Terbuka di Hutan, Jakarta
- Ehtisham Ahmad dan Bert Hoffman, *Indonesia: Decentralisation-Opportunities and Risks (World Bank Paper, Juni 1999)*.
- Em. Lukman Hakim, 2008, Bencana dan Filantropi Lokal, Kompas, 15 Januari 2008.
- Faiz Pan Muhammad, Penafsiran Penguasaan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi, www.jurnalhukum.blogspot.com
- Fitri Hasnita, Teori Investasi, www.sipoel.donmed.in
- FAQ (Frequently Asked Question) Disusun oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, www.google.com.
- Georges Langrod, *Administrative Contract (A Comparative Study)*, The American Journal of Comparative Law, Volume IV, Number III, Summer, 1955.
- Globalisasi dan Indonesia, Prespektif Minyak dan Gas, www.yahoo.com
- Hartojo Wigjowiyoto, RUU Minyak dan Gas Bumi 2001 Memberi Peluang Munculnya Dominasi Asing di Bidang Produksi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Kompas, 16 November 2001.
- Hendro Sangkoyo 2001, Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi), Perdu Manokwari, 2003 Laporan Perkembangan Proyek

Tanggung Juli 2003, dbase JATAM, Kasus Migas Indonesia "Proyek Tangguh", Antara, Kamis, 14 Juni 2001, Siaran Pers Aliansi Ornop Manokwari untuk Advokasi Tangguh, Manokwari, 12 April 2002; Dokumen Arndal Proyek LNG Tangguh di Teluk Bintuni Cacat Dalam Proses Penyusunannya, Down to Earth Nr. 50, Agustus 2001.

Hanan Nugroho, 2004, Deregulasi Setengah Hati: Tinjauan Terhadap Restrukturisasi Sektor Energi Indonesia, Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, Pasca Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Jakarta, 8-9 Desember 2004

Ivan Valentine Agung, 2007, Potret Advokasi Ekologis Vis a Vis Kejahatan Korporasi, Wahana Lingkungan Hidup, Jakarta

Indah Dwi Qurbani, 2002, Metamorphosis Imperialisme Dari Senapan Ke Perekonomian, Malang Pos, 11 Oktober 2002.

Indah Dwi Qurbani, Hak Gugat Organisasi Lingkungan, Jurnal Prisma, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Edisi 5, Tahun 2007.

Indah Dwi Qurbani, Illusi Cost Recovery, Opini Harian Kontan, 15 September 2008

Hidhal Kasim, 2000, Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' Dalam Kajian Hukum di Indonesia, Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif), Edisi 6, Tahun II, Jakarta, 2000.

Imam Sugema ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance Indonesia (Indef) dalam Ppijkti.wordpress.com.

I. Nyoman Nurajaya, 2002, Paradigma Pembangunan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; Prespektif Hukum dan Kebijakan, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Islam Malang (Unisma) Tahun VIII No. 16 Agustus 2002.

Jawa Pos, 9 September 2008.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2000, Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta

Kwik Kian Gie, 2008, Siasat Liberalisasi Ekonomi, Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis) Volume II No. 1 April-Juni 2008.

Kurtubi, Hindari Lahirnya UU MIGAS yang Rugikan Kepentingan Masyarakat, Media Indonesia, 27 Juni 2001

-----, Mengapa UU Migas Perlu Dicabut?, Koran Tempo Online, www.korantempo.com.

-----, Proceeding dalam International Conference of the International Association for Energy Economics, Praha, Republik Ceko, 2003, yang berjudul The Impact of Oil Industry Liberalization on The Efficiency of Petroleum Fuels Supply for The Domestic Market In Indonesia.

Kanishka Jayasuriya, Dari Kekuasaan negara ke Kekuasaan Global, diakses melalui rullysyumanda.org

Khoirunurrofik, *Calculating Revenue Shares From Natural Resources*, Regional University Consortium Conference : Regional Economic Development in A Decentralizing Indonesia, Project 497-0357/204-000 Strategic Objective 1 ECG USAID/Indonesia contract No. 497-00-98-00045-00, Central For Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park, Jakarta July 2-3 2002

Kontan, 13 November 2012.

Kontan, 9 September 2008

Kompas, 19 Mei 2012

Kompas, 11 Februari 2007

Kompas 10 September 2005.

Kompas 15 Januari 2013.

Kompas, 6 Maret 2008

Laporan tim peneliti hukum ekonomi dan pembangunan Indonesia, 1975, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Lilis Nur Faizah, 2007, Perkembangan Konsep Kepentingan Umum dalam Hukum Pengambilalihan Hak Atas Tanah di Indonesia (1960-2006), www.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2008.

Maria SW Sumardjono, 1998, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, tanggal 14 Februari 1998.

Mas Achmad Santosa, 2004, gugatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI): Perluasan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) Kajian Putusan No. 212/Pdt.G/2002/PN. Jkt Pusat, dalam jurnal kajian putusan pengadilan dictum masyarakat menggugat edisi 2 tahun 2004, LeIP 2004.

Maruarar Siahaan, *Relevansi Penguasaan Negara atas Cabang Produksi Strategis Menurut UUD 1945 dalam Transformasi Global*, Jurnal Konstitusi Volume 4, Nomor 3, September 2007.

M. Dawam Raharjo, 2001, Peran Negara dalam Proses Demokratisasi Ekonomi, *Jurnal Reformasi Ekonomi* Volume 2 No. 1 Januari-April 2001.

Majalah Jaringan Advokasi Tambang, 2005, Kebijakan Yang Melayani Pemodal, Maret 2005.

Mahfud MD, 2007, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, *Majalah Hukum Nasional* No. 2 Tahun 2007.

Media Indonesia, Terobosan atau Langkah Mundur? Pro Kontra RUU Minyak dan Gas Bumi, 27 Juni 2001.

Muhammad Hatta, 1977, Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33, *Majalah Gema Angkatan '45*.

Mudrajad Kuncoro, *menggugat Bagi Hasil Migas*, 4 Januari 2012.

Mas'oud. Mohtar, 2000, Prespektif Politik dan Konsolidasi Demokrasi, disampaikan dalam seminar nasional 'Konsolidasi Demokrasi Indonesia dalam Prespektif Komparatif', Auditorium Graha Sabha Pramana UGM, 9 September 2000.

Moempoeni Martoyo, 2001, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Penguasa, *Majalah Hukum Nasional (Pembinaan Hukum Nasional)* No. 2 Tahun 2001.

Oki Syeiful R. Harahap, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Opini Pikiran Rakyat*, 11 Januari 2006.

Propenas (Program Pembangunan Nasional).

Progres Report EMP Kangean Ltd, tahun 2005 dan 2007.

Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN Tahun 2006-2015

Rizka Elyza dan Nasrullah Salim, 2000, Ada apa dengan sektor energi Indonesia?, Life after oil, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. www.detik.com.

Surya, 21 Februari 2012

Sinar Harapan, 3 Juni 2012

Suara Indonesia 24 Juli 2012

- Sosrokoesumo dan Ann Soekatrie, 1984, Pelaksanaan Ketentuan pasal 33 UUD 1945 dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Segi-segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Sumber pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan Energi, Jakarta.
- Soetaryo Sigit, 1996, Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996
- Soetaryo Sigit dan S. Yudonarpodo, 1993, *Legal Aspect of The Mineral Industry in Indonesia*, Jakarta, Indonesian Mining Association (IMA)
- Siti Sundari Rangkuti, 1991, Inovasi Hukum Lingkungan: dari *Ius Constitutum* menuju *Ius Constituendum*, pidato pengukuhan Guru Besar Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Syamsul Ma'arif, 2006, Dinamika Peran Negara dalam Proses Liberalisasi dan Privatisasi, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Program Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada.
- Stefinus Haryanto, Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan, teks oratio dies, Jakarta, 1995. Steven Shavell, *Economic Analysis of Law*, materi "Harvard University Online Course", <http://www.hls.edu/>.
- Stephanie Freud, 2003, Ringkasan Eksekutif Agen Kredit Ekspor di Indonesia dengan Fokus Terhadap Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Anonim, *Case for world bank withdrawal of support to the extractive industries*.
- Subiako Tjakrawerdaja, 2008, Merunggu Undang-undang Induk Mengenai Perekonomian Nasional, *Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis)* Volume II No. 1 April-Juni 2008.
- Said Zainal Abdullah, Pembangunan; Globalisasi dan Ketergantungan, www.bappenas.go.id
- Toni Djogo, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), www.beritabumi.or.id.
- Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, *Jurnal Konstitusi*, Desember, 2012.

Wijayono et.al, 2000, Petroleum Report Indonesia 1999, Agenda 21 Sektor Energi: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui Pembangunan Sektor Energi, Jakarta, Minergy.com.

www.id.petroleum-wacht.org

Yong-Joon Kim, "Constitutional Adjudication System: Experience of Korea," www.fas.harvard.edu/~asiactr/hag/200001/0001a002.htm.

